

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Pemberdayaan Ekonomi di Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa (POMOSDA) Nganjuk**

Pemberdayaan ekonomi di Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa (POMOSDA) Nganjuk merupakan suatu proses terstruktur dan terintegrasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan santri, alumni, dan masyarakat sekitar melalui pendekatan berbasis aset dan kewirausahaan. Pemberdayaan dilakukan melalui tahapan penyadaran, pembinaan, hingga kemandirian, dengan melibatkan subjek strategis yakni santri, masyarakat lokal, dan alumni. POMOSDA mengembangkan berbagai program pelatihan vokasional yang mencakup sektor pertanian, peternakan, perikanan, keterampilan teknis dan kreatif, serta mengelola unit usaha mandiri dan koperasi pesantren sebagai wahana penguatan ekonomi komunitas. Peran kyai dan pengelola pesantren sangat sentral dalam merumuskan arah kebijakan dan memastikan integrasi nilai-nilai keislaman dalam praktik ekonomi. Dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia, pelestarian lingkungan, dan pemanfaatan teknologi digital, pemberdayaan ekonomi di POMOSDA tidak hanya berdampak secara sosial-ekonomi, tetapi juga menjadi model inspiratif bagi pesantren lain dalam membangun kemandirian ekonomi berbasis nilai dan potensi lokal.

##### **2. Manajemen Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren Di Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa (POMOSDA) Nganjuk**

Manajemen pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren di Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa (POMOSDA) Nganjuk dilaksanakan melalui pendekatan sistemik, integratif, dan berkelanjutan yang mengacu pada nilai-nilai Islam serta teori-teori manajemen modern. Pondok ini

mengembangkan landasan konseptual pemberdayaan ekonomi yang berpijak pada integrasi antara dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi sebagai kerangka pembangunan manusia seutuhnya (*Insan Kamil*). Secara manajerial, pemberdayaan dilakukan melalui perencanaan partisipatif, struktur organisasi fungsional, musyawarah dalam pengambilan keputusan, dan pembagian tugas yang terstruktur. Pelaksanaan program mencakup pelatihan keterampilan, pemanfaatan sumber daya lokal, pengelolaan keuangan yang transparan, pemasaran berbasis nilai, serta pelibatan aktif santri, alumni, dan masyarakat. Sumber daya dikelola dengan pendekatan berbasis aset dan partisipatif untuk menjamin keberlanjutan, sementara proses pelatihan didukung dengan teknologi dan model pembelajaran berbasis kerja. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi serta indikator keberhasilan berbasis outcome. Penerapan nilai-nilai Islam secara konsisten menjadi fondasi dalam membentuk etos kerja, budaya organisasi, dan keberlanjutan program. Kemitraan strategis dengan pemerintah, swasta, dan akademisi turut memperkuat ekosistem pemberdayaan. Dalam konteks teoretis, POMOSDA mengintegrasikan pendekatan *Resource-Based View - RBV*, *Community Empowerment Theory*, *Social Entrepreneurship Theory*, *Islamic Value-Based Management*, *Local Economic Development Theory*, *Sustainable Development Theory* hingga *Integrated Empowerment Management Theory* dalam kerangka pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Dengan demikian, manajemen pemberdayaan ekonomi di POMOSDA menjadi model holistik yang memadukan nilai religius, praktik kewirausahaan, dan penguatan kapasitas komunitas dalam kerangka pembangunan pesantren yang mandiri dan transformatif.

## **B. Implikasi praktis dan teoritis**

### **1. Implikasi praktis**

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan mengenai manajemen pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren di Pondok Modern Sumber Daya

At-Taqwa (POMOSDA) Nganjuk, terdapat beberapa implikasi praktis yang dapat dijadikan acuan bagi pengelola pesantren, pembuat kebijakan, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam mengembangkan kemandirian ekonomi pesantren secara berkelanjutan.

*Pertama*, pesantren perlu menerapkan model manajemen pemberdayaan ekonomi secara terstruktur dan berbasis partisipasi, sebagaimana dilakukan oleh POMOSDA. Artinya, setiap tahapan program—mulai dari perencanaan hingga evaluasi—perlu melibatkan berbagai unsur internal seperti pimpinan pesantren, guru, santri, dan alumni, serta unsur eksternal seperti masyarakat sekitar dan mitra strategis. Keterlibatan ini akan menciptakan rasa memiliki, memperkuat jejaring sosial-ekonomi, dan meningkatkan efektivitas program. Praktik musyawarah dalam pengambilan keputusan dan struktur organisasi fungsional dapat menjadi contoh bagi pesantren lain dalam menciptakan sistem kerja yang efisien dan akuntabel.

*Kedua*, pengembangan unit-unit usaha pesantren sebaiknya diarahkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam, kearifan lokal, dan prinsip kewirausahaan sosial. Pendekatan ini bukan hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga membangun karakter dan etos kerja santri yang berorientasi pada kebermanfaatan. POMOSDA menunjukkan bahwa program pelatihan keterampilan di bidang pertanian terpadu, peternakan, tata boga, desain grafis, dan lainnya dapat dijalankan bersamaan dengan penguatan nilai spiritual dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pesantren perlu merancang kurikulum pelatihan yang adaptif, kontekstual, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat serta dunia kerja.

*Ketiga*, pesantren didorong untuk mengoptimalkan sumber daya lokal dan menerapkan prinsip keberlanjutan dalam setiap kegiatan ekonomi. Seperti yang dilakukan POMOSDA, pengelolaan aset fisik (lahan, fasilitas) dan non-fisik (keterampilan, jejaring sosial, nilai spiritual) harus diarahkan untuk menciptakan keberlanjutan jangka panjang. Ini meliputi pelatihan santri dan masyarakat secara berkala, penggunaan teknologi tepat guna, serta manajemen keuangan yang transparan dan profesional. Dengan begitu, pesantren mampu

menjaga kontinuitas program sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi lokal.

*Keempat*, kemitraan strategis antara pesantren dengan pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan tinggi harus diperkuat. Kolaborasi lintas sektor ini tidak hanya membantu dari sisi pendanaan dan akses pasar, tetapi juga dalam hal inovasi program, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan sistem evaluasi berbasis indikator kinerja. Pemerintah daerah, khususnya dinas terkait (pendidikan, koperasi, pertanian), perlu melihat pesantren seperti POMOSDA sebagai mitra pembangunan daerah dalam konteks pengurangan kemiskinan dan peningkatan ketahanan ekonomi berbasis komunitas.

Dengan menerapkan implikasi-implikasi praktis ini, maka pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan masyarakat yang mampu mencetak generasi mandiri, berdaya saing, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan keadilan sosial.

## 2. Implikasi teoritis

Hasil penelitian mengenai manajemen pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren di Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa (POMOSDA) Nganjuk memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori-teori manajemen, pemberdayaan, dan ekonomi Islam dalam konteks kelembagaan pesantren. Implikasi teoritis ini memperkaya khazanah keilmuan dengan menunjukkan bahwa praktik pemberdayaan ekonomi dapat diimplementasikan secara efektif melalui integrasi antara pendekatan religius, sosial, dan kewirausahaan, serta pengelolaan berbasis komunitas.

*Pertama*, temuan ini memperkuat relevansi pendekatan *Resource-Based View (RBV)* dalam konteks pemberdayaan berbasis komunitas keagamaan. RBV menekankan pentingnya pengelolaan aset internal sebagai keunggulan kompetitif. Dalam kasus POMOSDA, aset-aset berupa nilai keislaman, kepemimpinan kyai, jaringan alumni, keterampilan lokal, dan infrastruktur pesantren diolah menjadi kekuatan ekonomi yang berdampak

luas. Hal ini menunjukkan bahwa teori RBV dapat dikontekstualisasikan dalam kerangka spiritual-sosial, bukan hanya dalam kerangka bisnis korporasi semata.

*Kedua*, penelitian ini memberikan penguatan empirik terhadap *Community Empowerment Theory* dan *Social Entrepreneurship Theory*. Pemberdayaan yang dilakukan POMOSDA berjalan dalam kerangka kolektif, partisipatif, dan berorientasi pada transformasi sosial, sebagaimana dipotret dalam teori pemberdayaan komunitas. Sementara itu, pengelolaan unit usaha pesantren dengan prinsip kebermanfaatan, keadilan, dan keberlanjutan menunjukkan bahwa pesantren mampu berfungsi sebagai agen kewirausahaan sosial (*social enterprise*), dengan mengedepankan misi sosial di atas orientasi profit. Teori-teori ini diperkuat secara konseptual melalui praktik langsung yang berhasil diterapkan dalam ekosistem pesantren.

*Ketiga*, model manajemen di POMOSDA memberikan kontribusi penting terhadap *Islamic Value-Based Management Theory*. Penelitian ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam—seperti amanah, kejujuran, keadilan, kerja sama, dan tawakal—dapat diimplementasikan secara nyata dalam tata kelola ekonomi dan kelembagaan. Nilai-nilai tersebut bukan hanya menjadi etika personal, tetapi juga membentuk budaya organisasi yang transformatif. Implikasi ini mengindikasikan perlunya penguatan dimensi spiritual dalam pengembangan teori manajemen modern, khususnya dalam konteks lembaga berbasis agama.

*Keempat*, temuan ini mendorong elaborasi lebih lanjut terhadap *Integrated Empowerment Management Theory* yang memadukan berbagai dimensi—spiritual, sosial, ekonomi, dan lingkungan—dalam kerangka manajemen yang sistemik dan berkelanjutan. POMOSDA menjadi bukti nyata bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren dapat menjadi praktik manajerial yang komprehensif, yang tidak hanya menjawab kebutuhan ekonomi komunitas, tetapi juga menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan berbasis lokal. Ini membuka ruang bagi pengembangan teori

manajemen pemberdayaan yang lebih inklusif, holistik, dan relevan dengan konteks kultural Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya penerapan teoritis dalam studi pemberdayaan ekonomi, tetapi juga menawarkan kontribusi substantif bagi pengembangan model manajemen yang khas pesantren—yakni manajemen yang religius, berorientasi sosial, dan berbasis potensi komunitas lokal. Temuan ini layak dijadikan rujukan dalam pengembangan teori dan praktik manajemen pendidikan Islam, ekonomi pesantren, serta pembangunan masyarakat berbasis nilai.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Setiap penelitian memiliki keterbatasan yang harus diakui agar dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai hasil dan implikasinya. Dalam penelitian mengenai pola manajemen pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren, seperti yang dilakukan oleh POMOSDA, memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, antara lain:

1. Penelitian ini cenderung berfokus pada konteks lokal yang spesifik, yaitu Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa (POMOSDA) dan komunitas sekitarnya. Hal ini membatasi generalisasi temuan penelitian ke komunitas lain yang memiliki karakteristik budaya, sosial, dan ekonomi yang berbeda. Misalnya, hasil penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya relevan untuk komunitas non-pesantren atau yang tidak memiliki keterikatan kuat dengan nilai-nilai Islam.
2. Pengumpulan data sebagian besar didasarkan pada observasi dan wawancara dengan pihak yang terkait langsung dengan program, seperti santri, ustadz, masyarakat sekitar pesantren, dan alumni. Pendekatan ini memiliki risiko bias subjektivitas, karena persepsi responden mungkin dipengaruhi oleh pengalaman pribadi atau afiliasi dengan pesantren. Data kuantitatif yang lebih rinci, seperti dampak ekonomi dalam jangka panjang

atau perbandingan produktivitas sebelum dan sesudah program, masih perlu dikembangkan untuk melengkapi gambaran yang lebih objektif.

3. Penelitian ini belum sepenuhnya mengeksplorasi dampak keberlanjutan program secara lintas generasi. Meskipun ada indikasi bahwa program ini memberikan manfaat jangka panjang, belum ada analisis mendalam tentang bagaimana nilai-nilai dan hasil pemberdayaan ini dapat terus diwariskan dan diadaptasi oleh generasi berikutnya dalam menghadapi tantangan masa depan, seperti perubahan iklim atau digitalisasi ekonomi.

#### **D. Rekomendasi**

1. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan desain *komparatif-longitudinal* dengan melibatkan berbagai tipe pesantren, baik tradisional maupun modern, di beberapa wilayah Indonesia. Pendekatan ini akan memungkinkan perbandingan antar pesantren dalam konteks sosial-budaya dan kelembagaan yang berbeda, sehingga hasil penelitian menjadi lebih generalisabel. Pengumpulan data kuantitatif secara berkala, seperti indikator pertumbuhan pendapatan unit usaha pesantren, penyerapan tenaga kerja, dan produktivitas sektor ekonomi (misalnya pertanian dan peternakan), perlu dilakukan minimal setiap enam bulan selama dua tahun. Strategi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dinamika perubahan dan mengevaluasi keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi secara lebih akurat, khususnya dalam konteks transfer nilai dan keterampilan lintas generasi.
2. Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa (POMOSDA) disarankan mengembangkan sistem *Monitoring and Evaluation (M&E)* berbasis indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators/KPI*) yang terstruktur dan terukur. Beberapa indikator yang dapat diterapkan meliputi: (1) peningkatan jumlah unit usaha baru yang digerakkan oleh santri atau alumni dengan target minimal 10 unit per tahun; (2) kenaikan rata-rata pendapatan peserta pelatihan minimal sebesar 20% dalam enam bulan setelah program; dan (3) tingkat kelangsungan usaha (*survival rate*) minimal sebesar 75%

satu tahun setelah pelatihan. Untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas sistem M&E ini, laporan triwulanan perlu disusun secara konsisten dan ditinjau oleh mitra independen, seperti lembaga pendidikan tinggi atau lembaga riset terpercaya.

3. Pemerintah Kabupaten Nganjuk perlu merancang kebijakan afirmatif berupa Skema Dana Insentif Pemberdayaan Pesantren (SDIPP) guna memperkuat peran pesantren sebagai aktor pembangunan ekonomi lokal. Skema ini dapat meliputi *matching grant* sebesar 50% dari total kebutuhan modal awal unit usaha pesantren, dengan plafon maksimal Rp50 juta per program. Selain itu, perlu dilakukan penugasan penyuluh teknis dari dinas terkait (pertanian, perikanan, koperasi) untuk mendampingi program selama sedikitnya 12 bulan. Dalam jangka menengah, pemerintah perlu mengintegrasikan pesantren sebagai *Sentra Ekonomi Pesantren* dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD), dengan alokasi anggaran khusus, misalnya 2% dari total belanja sektor UMKM dan koperasi. Kebijakan terukur ini akan memperkuat sinergi antara pesantren dan pemerintah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis komunitas dan nilai keislaman.